

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- A. Djoko Sumaryanto. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing. Surabaya.
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. UNPAM PRESS. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd. Azis. 2015. *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press. Surabaya.
- H.M. Said Karim dan Haeranah. 2016. *Delik – Delik Di Dalam Kodifikasi*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Ismu Gunaidi dan Jonaedi Effendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Kadi Sukarna. 2016. *Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP Dalam Perspektif Teori Keadilan*. UNNES PRESS. Semarang.
- Kusumadi Pudjosewojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

-----, 2007. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.

----- dan Theo Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika. Jakarta.

-----, 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Penerbit Amrico. Bandung.

-----, 2013. *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

Prpto Soepardi. 1991. *Surat Dakwaan*. Usaha Nasional. Surabaya.

Rafika Nur. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. CV. Cahaya Arsh Publisher. Gorontalo.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar - Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor.

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

Teguh Prasetyo. *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. Penerbit K-Media. Jakarta

## **JURNAL**

A. A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat". *Jurnal Advokasi*, Vol. 8. No. 2. 2018. Hlm. 179 - 182, 187.

- Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, dan Ani Purwanti. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)". *Jurnal Diponegoro Law*, Vol. 5. No. 4. 2016. Hlm. 8 - 9.
- Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas. "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IX. No. 4. 2021. Hlm. 140
- Emmy Sunarlin. "Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu". *Jurnal IUS*, Vol. 7. No. 2. 2019. Hlm. 33 - 45
- Fahrurrozi. "Sistem Pemidanaan dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP". *Jurnal Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 10 No. 1. 2019. Hlm. 52 - 55
- Fariaman Laia. "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan Dalam Jabatan". *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1. No. 2. 2022. Hlm. 7.
- Fioren Alesandro Keintjem. "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 10. No. 5. 2021. Hlm. 190 - 199.
- Giovani Tampinongkol. "Keterangan Palsu di Atas Sumpah Pasal 242 KUHP Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7. No. 1. 2018. Hlm. 76.
- Hendrika Beatrix Aprilia Ngape. "Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum". *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2. No. 1. 2018. Hlm. 134 - 137.
- Husni Thamrin, Ayu Linanda dan Mochamad Rifa'i. "Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian". *Jurnal Collegium Studiosum*, Vol. 4. No. 1. 2021. Hlm. 4.
- Ike Indra Agus Setyowati. "Pembantuan Dan Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Kasus Perkosaan Anak". *Jurnal Media Iuris*. Vol. 1. No. 2. 2018. Hlm. 281 - 299
- I. Rusyadi. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana". *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 5. No. 2. 2006. Hlm. 133

- Justino Armando Mamujaja. "Penerapan Pasal 242 KUHPidana Terhadap Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 3. No. 2. 2014. Hlm. 13 - 14.
- M Khaerul, Amir Ilyas, dan Audyna Mayasari Muin. "Sistem Pembuktian Pemalsuan Dokumen Dalam Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia". *Jurnal Living Law*. Vol. 14. No. 1. 2022. Hlm. 63
- Mukhlis R. "Tindak Pidana di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4. No. 1, 2012. Hlm. 201 - 202.
- Ni Made Yulia Chitta Dewi, A.A. Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Asas Unus Testis Nullus Testis Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Anak". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 2. No. 1. 2012. Hlm. 191 - 195
- Rommy Haryono Djojarahardjo. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata". *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Vol. 5. No. 1. 2019. Hlm. 95 - 96.
- Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1. 2019. Hlm. 36.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

- Direktori Putusan Mahkamah Agung. 2019. Putusan Nomor 137/Pid.B/2019/PN.Kbu, putusan.mahkamahagung.go.id. Diunduh pada tanggal 01 Oktober 2022.

## **WEB SITE**

- Arif Maulana. Agustus 2020. *Hukum Online*. Diakses pada November 2022, dari Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>,
- Chyntia Sami Bhayangkara. Agustus 2022. *SUARA.Com*. Diakses pada November 2022, dari Ini Sanksi Pidana Laporan Palsu, Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo Bisa Dipidana?: <https://www.suara.com/news/2022/08/15/085043/ini-sanksi-pidana-laporan-palsu-laporan-pelecehan-istri-ferdy-sambo-bisa-dipidana>
- Hukum Online. Februari 2022. *Hukum Online*. Diakses pada November 2022, dari Surat Dakwaan : Pengertian, Fungsi dan Jenis - Jenisnya:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da?page=1>

Issha Harruma. Mei 2022. *KOMPAS*. Diakses pada November 2022, dari Tahapan dalam Proses Peradilan Pidana: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana>

Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. 2020. *Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya*. Diakses pada November 2022, dari Laporan Polisi: <https://tabessby.jatim.polri.go.id/main/pelayanan/7/laporan-polisi>

Kepolisian Resor Pasangkayu. 2020. *Kepolisian Resor Pasangkayu*. Diakses pada November 2022, dari Laporan Polisi: <https://polrespasangkayu.com/laporan-polisi>

Maruli Harahap. Februari 2022. *DALIMUN THE TAMPUBOLON*. Diakses pada November 2022, dari Langkah Hukum Terhadap Laporan Polisi yang Mengada - ada: <https://dntlawyers.com/langkah-hukum-terhadap-laporan-polisi-yang-mengada-ada/>. Pengadilan Militer Manado. (n.d.). *Pengadilan Militer Manado*. Diakses pada November 2022, dari Alat Bukti dan Barang Bukti: <https://www.dilmil-manado.go.id/getFile.php?file=Alat+Bukti+dan+Barang+Bukti.pdf>

Vanya Karunia Mulia Putri. Juli 2021. *KOMPAS*. Diakses pada November 2022, dari Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/01/132727869/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan>

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab – Undang – Undang Hukum Acara Pidana)